

Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp11,2 Miliar

JAKARTA (IM) - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, didakwa menerima suap Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Suap itu diterima Hasbi bersama terdakwa Dadan Tri Yudianto.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaannya di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu telah menerima hadiah berupa uang keseluruhannya sejumlah Rp 11.200.000.000 (Rp11,2 miliar) dari Heryanto Tanaka," kata jaksa di ruang sidang.

Jaksa menjelaskan, Hasbi Hasan menerima suap tersebut dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana/KSP ID, Heryanto Tanaka (HT). Suap itu disebut diberikan Heryanto agar Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bersalah dalam sidang kasasi perkara nomor: 326K/Pid/2022 sehingga perkara keadilan KSP Intidana yang berproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto.

Pengajuan kasasi itu merupakan buntut divonis bebasnya Budiman Gandhi atas kasus pemalsuan surat yang diajukan Heryanto Tanaka. Heryanto melaporkan Budiman Gandhi Suparman selaku Ketua Umum KSP Intidana atas tindak pidana pemalsuan surat/akta notaris.

Perkara tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan no 5/19 489/Pid.B/2021/PN Smg. Amar putusan perkara itu membe-

baskan Budiman dari segala dakwaan penuntut umum.

Terdakwa Dadan menyanggapi dengan mengurus perkara tersebut dengan meminta dana pengurusan perkara Rp15 miliar. Jaksa mengatakan transaksi dana pengurusan perkara itu dikemas dalam bisnis skincare.

"Atas permintaan tersebut Dadan Tri Yudianto menyanggapi dengan mengajukan biaya pengurusan perkara sebesar Rp15 miliar yang dikemas sekolah-olah terdapat perjanjian kerja sama bisnis skincare antara Dadan Tri Yudianto dengan Heryanto Tanaka," ucap jaksa.

"Dari permintaan Dadan Tri Yudianto itu Heryanto Tanaka menyetujui untuk menyerahkan biaya pengurusan perkara kepada Terdakwa melalui Dadan Yri Yudianto sebesar Rp Rp 11.200.000.000 (Rp 11,2 miliar)," sambungnya.

Adapun perkara kasasi nomor 362K/Pid/2022 itu diadili oleh Sri Murwahyuni selaku ketua majelis. Kemudian, Gazalba Saleh selaku hakim anggota, dan Prim Haryadi selaku hakim anggota.

Singkat cerita, majelis hakim yang mengadili kasasi perkara nomor 362K/Pid/2022 menyatakan Budiman Gandhi bersalah. Budiman dihukum dengan pidana 5 tahun penjara sebagaimana yang diinginkan Heryanto.

Atas perbuatannya, Hasbi Hasan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. ● me

Firli Bahuri Bungkam soal Berita Apartemen Mewahnya Digeledah

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif, Firli Bahuri tak mau menjawab wartawan ketika ditanya soal berita tim Polda Metro Jaya melukukan penggeledahan di apartemen mewah miliknya di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (5/12).

Firli hanya melemparkan senyuman hingga melambatkan tangan kepada para wartawan.

"Terima kasih ya, terima kasih," kata Firli Bahuri usai menyalin klarifikasi di Gedung Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebagai informasi, apartemen milik Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri di kawasan Apartemen Essence, Jalan Darmawangsa X, nomor 86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikabarkan digeledah Polda Metro Jaya.

Saat ini, di lokasi terpantau mobil Ditreskrimus Polda Metro Jaya di parkir apartemen mewah tersebut. Sementara itu, terlihat pula mobil elf berwarna abu-abu hitam bertuliskan Ditreskrimus Polda Metro Jaya mejeng di pelataran parkir apartemen. Namun, tak tampak anggota polisi yang berada di

sekitar mobil tersebut.

Adapun suasana depan pintu apartemen dijaga satpam, yang mana setiap kendaraan yang hendak masuk ke apartemen tersebut harus diperiksa dahulu. Selain itu, pengendaraan yang hendak masuk pun bakal ditanyai tujuannya datang ke apartemen tersebut.

Awak media yang ada di depan apartemen dilarang untuk memasuki ke dalam apartemen oleh pihak sekuriti. Sehingga, hanya bisa berada di depan jalanan apartemen milik Firli Bahuri.

Pihak sekuriti pun sempat melarang awak media untuk mengambil video ataupun foto dari sela-sela pagar apartemen. Alhasil, awak media hanya bisa mengambil video dan foto dari seberang jalanan.

Adapun mobil milik Ditreskrimus Polda Metro Jaya itu yang sebelumnya tampak terparkir di pelataran parkir apartemen, telah beralih posisinya. Awak media tak lagi bisa melihat mobil tersebut ditambah sekuriti melarang awak media melihat dari pagar apartemen. ● lus

Sidang Paripurna DPR Putuskan Menyetujui 7 Hakim Agung MA

JAKARTA (IM) - Sidang Paripurna DPR RI memutuskan, menyetujui calon 7 hakim agung tahun 2023 jadi hakim agung, Selasa (5/12).

Sebelum mengambil persetujuan, Ketua DPR RI, Puan Maharani mempersilakan terlebih dahulu pimpinan Komisi III DPR untuk memaparkan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan atau *fit and proper test*.

Setelah itu, Puan mengambil keputusan dengan menanyakan sikap masing-masing anggota DPR atas apa yang disampaikan pimpinan Komisi III DPR.

"Sidang Dewan yang terhormat, sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah

Agung tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota Dewan.

Dalam paparan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburrahman mewakili Komisi III DPR melaporkan proses seleksi terhadap hakim MA dan hakim ad hoc HAM MA.

Ketujuh hakim Agung tersebut di antaranya; Calon hakim agung kamar pidana Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Calon hakim agung kamar pidana Ainal Mardiah, Calon hakim agung kamar pidana Noor Edi Yono, Calon hakim agung kamar pidana Sigid Triyono.

Selanjutnya, Calon hakim agung kamar pidana Sutarjo, Calon hakim agung kamar pidana Yanto dan Calon hakim agung kamar perdata Agus Subroto. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



DEKLARASI KAMPANYE PEMILU DAMAI DI ACEH

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki (tengah) bersama Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Aceh Saiful (kiri) serta pejabat Forkompinda provinsi serta pimpinan partai politik melepas burung merpati dan balon saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2024 di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Selasa (5/12).

Penyidik KPK Cecar Wamenkumham Terkait Uang Pengurusan Administrasi

Selain Wamenkumham Prof Edi Hiariej, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lain kasus dugaan suap dan gratifikasi.

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan gratifikasi, di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (4/12).

Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi atas berkas perkara tersangka lain di kasus tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan Eddy Hiariej dicecar terkait peran dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi itu. Salah satunya, mengenai pengurusan

administrasi hukum umum tanpa aturan.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dalam upaya penyelesaian perkara yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, dalam upaya penyelesaian pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kumham oleh PT CLM yang diduga tanpa melalui aturan semestinya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (5/12).

Lebih jauh, Ali mengatakan pengurusan administrasi hukum umum di Kemenkumham itu dilakukan tanpa melalui aturan semestinya, serta diduga adanya pemberian sejumlah uang dalam

proses tersebut.

"Disertai adanya dugaan pemberian sejumlah uang," jelasnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, telah menetapkan Wamenkumham Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain Eddy, ada tiga tersangka lagi yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Sayangnya, Alexander Marwata masih enggan membeberkan secara detail nama-nama pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kemudian penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu ya, dengan empat orang tersangka, dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu," kata Alexander Marwata di Kantornya, Jalan Kun-

ingan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/11) lalu.

Gugatan Praperadilan

Seperti diketahui, Wamenkumham Eddy Hiariej mengugat praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebelumnya mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Ia mengatakan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk melakukan gugatan prapera-

adilan.

"Kami tentu siap hadapi, silakan sebagai suatu hak tersangka," kata Ali Fikri sembari menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu dikatakannya kepada wartawan Senin (4/12) kemarin.

"Kami hanya ingin sampaikan bahwa semua proses penyidikan yang kami lakukan tentu telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. ● han

Ganjar Beberkan Cara Mengontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeberkan cara yang dianggapnya ideal untuk mengendalikan harga bahan pokok yang kerap melambung jelang akhir tahun. Menurutnya, perlu pengendalian harga sembako mulai dari sisi hulu hingga hilir.

Ia pun menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam rantai produksi hingga distribusi.

"Dari sisi upstream-nya, dari sisi hulunya adalah memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi dan data yang benar, dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik," kata Ganjar kepada wartawan, setelah mengunjungi Pasar Baru Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12).

Ganjar mengambil contoh soal pemakaian pupuk dan mekanisasi alat pertanian untuk petani yang mungkin belum memahami betul caranya.

"Karena kemarin pupuk juga menjadi soal, mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira membutuhkan perhatian," ujar eks Gubernur Jawa Tengah itu.

"(Faktor) terakhir adalah out taker-nya, out taker-nya ini kalau bahan pokok kami mendorong agar Bulog mendapat penugasan," ucapnya.

Ia berharap, Bulog efektifkan sistem logistik daerah sehingga rantai kendali menjadi lebih pendek.

Keluhan Tukang Ojek

Ganjar Pranowo sempat

menerima keluhan terkait panjangnya antrean SPBU di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang tukang ojek, Muhammad Rahib (50), menyampaikan keluhan itu ketika Ganjar datang blusukan ke Pasar Baru Klandasan Ilir, Balikpapan, Selasa (5/12).

"BBM tuh antre, Pak, antre," kata Rahib.

Antrean panjang itu membuat tukang ojek seperti halnya menanti giliran isi bensin hingga 20 menit. Hal ini juga menimbulkan kemacetan panjang pada pagi-siang hari.

"Aneh kan, sebenarnya di sini itu pabriknya minyak, lah kok beli BBM, beli bensin, beli Peralite, kok ngantri panjang," ujar Ganjar dengan bahasa Jawa.

Rahib menegaskan, ini merupakan kali pertamanya mengadukan masalah itu kepada pejabat.

"Niki pertama kali kulo kepanggehe kali peggede, menyampaikan uneg-uneg niku (Ini pertama kali saya mengadukan persoalan kepada pejabat, menyampaikan uneg-uneg) " ungkapnya.

Kepada wartawan, Ganjar mengaku prihatin atas keluhan yang ia dengar, sebab itu bukan merupakan satu-satunya keluhan yang ia dengar ketika berkampanye sejak 28 November 2023.

"Kemarin kami melihat di Papua, saya melihat pemandangan yang sama, di NTT kemarin kami melihat, dan hari ini di Balikpapan," ujarnya.

Menurut Ganjar hal itu ironis dan berharap agar pemangku kepentingan terkait bisa memberikan solusi. ● han

Cak Imin Bilang Para Kiai Mulai Digoda Uang Miliaran untuk Dukong Paslon Tertentu

ACEH (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan, para kiai di Jawa Timur mulai ditawari uang miliaran rupiah untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Muhaimin menyampaikan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalec, Siam, Darussalam, Aceh Besar, Selasa (5/12).

"Semua harus waspada, karena kompetisi pilpres sangat keras. Saya menyampaikan salam dari para ulama-ulama di Jawa Timur, pada para abu-abu dan kiai di Nanggroe Aceh Darussalam. Beliau-beliau menyampaikan, Assalamualaikum," ujar Muhaimin.

Cak Imin -panggilan Muhaimin - menyebut bahwa para kiai itu sudah lama bergerak untuk memenang-

kannya dan Anies Baswedan. Namun, sejumlah pihak akhir-akhir ini datang dan memberikan sejumlah uang agar para kiai itu berpaling.

"Yang sudah viral ada ulama, kiai didatangi uang miliaran," ujarnya.

Meski begitu, Muhaimin tetap optimis mendapatkan dukungan dari para kiai. Ia mengklaim, para kiai yang mendukungnya tidak tergoda dengan berapa pun besar uang yang diberikan.

"Tapi, ada kiai yang bilang pada kami, 'Tenang saja, meskipun kita diberi uang besar, kami kumpulkan uang itu, tidak kami anggap. Kami tetap istiqomah bersama Amin, karena akidah, keyakinan kami tidak bisa dibeli dengan uang dan apa pun,'" paparnya.

Selain mengingatkan para Kiai soal gidaan uang untuk memenangkan paslon ter-

tentu, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat selama ini tidak terkait urusan Pemilihan Presiden 2024. Bansos merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dan disepakati oleh DPR RI.

"Hari ini banyak uang beredar, termasuk di rakyat, yang itu bersifat bantuan sosial. Itu tidak ada urusannya sama pemilu," ujar Cak Imin.

Anggaran untuk bansos diambil dari APBN bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Sehingga tak boleh ada salah satu kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengklaim pemberian bantuan tersebut.

"(Bansos) itu uang rakyat untuk rakyat. Jadi, tidak boleh ada yang mengklaim bantuan-bantuan itu milik salah satu calon," katanya. ● me



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KEJAHATAN DI SUKABUMI

Petugas memusnahkan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Jabar, Selasa (5/12). Kejari Kota Sukabumi memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 72 perkara yang berkekuatan hukum tetap berupa senjata tajam, handphone, obat terlarang dan narkotika.

mandiri				
PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)				
Bawah dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut:				
No.	Nama	Alamat Rumah	Jumlah tagihan per 05 Desember 2023	Alamat Agunan
1.	PT. Sarana Paritel Utama	Jl. Permata Hiau Blok J 2/11, Rt. 008, Rw.001, Kel.Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kampung Bokansara Rt.04, Rw.06, Dusun III, Desa Karang Mulya, Kec.Cibarusah, Kab. Bekasi.	460.328.511.00	Desa Karang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 08 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta
SME Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421
Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 06 Desember 2023
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Collection & Recovery Center Jakarta